

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengukuran Kinerja**

##### **1. Pengertian Pengukuran**

Pengukuran pada dasarnya merupakan kegiatan penentuan angka bagi suatu objek secara sistematis. Pengukuran memegang peranan penting, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk penyajian informasi. (Wahyuni & Nasution, 2019)

Pengukuran adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh besaran kuantitatif dari suatu obyek tertentu dengan menggunakan alat ukur yang baku. (Faradiba, 2020)

Pengukuran adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi data secara kuantitatif. Hasil dari pengukuran dapat berupa informasi-informasi atau data yang dinyatakan dalam bentuk angka ataupun uraian yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan. (Pelawi & Taufik, 2021)

##### **2. Pengertian Kinerja**

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Ondang et al., 2021). Kinerja (*performance*) adalah kemampuan kerja peserta didik untuk menggunakan atau mengaplikasikan kecakapan baru yang diperoleh. Jadi dapat disimpulkan bahwa peningkatan kinerja adalah usaha atau kegiatan mempertinggi kualitas produk sehingga pembelajaran lebih efektif dan membawa perbaikan atau kemajuan dalam hal kemampuan kerja dan kecakapan peserta didik yang nantinya dapat diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. (Ali Agus, 2021)

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama dan dapat di

simpulkan bahwa Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu (Y. H. Putri & Utara, 2021).

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Yuliawati, 2021).

Kinerja adalah pencapaian suatu hasil kerja oleh individu, disesuaikan dengan peran dan tugas individu tersebut dalam suatu perusahaan pada periode waktu tertentu, yang menghubungkan antara suatu ukuran nilai atau standar tertentu di suatu perusahaan (Lintang Firda Sari Heprilina, 2021).

Kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. (Nadia Clarisa Essau et al., 2021)

### **3. Pengertian Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja (*Performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan) hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan. (Saputra et al., 2019)

Pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan penilaian terhadap kualitas aktivitas kerja yang dilakukan. Pengukuran kinerja adalah suatu set matrik yang digunakan untuk menghitung efisiensi dan efektifitas dalam suatu rangkaian tindakan. (Ihza et al., 2020)

Pengukuran kinerja adalah penentuan secara *periodic*, efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan personelnnya, berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. (Indra Gunawan, 2020)

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) memiliki pengertian suatu proses penilaian tentang perkembangan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia, termasuk informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan perusahaan maupun organisasi. (Oktania et al., 2021)

Pengukuran kinerja adalah “tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang terdapat di dalam perusahaan, hasil pengukuran kemudian dipergunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian”. (Faradiba, 2021)

Pengukuran kinerja digunakan untuk mengetahui pencapaian tujuan perusahaan terhadap kinerja unit bisnis dengan mengevaluasi hasil pencapaian yang telah diraih melalui strategi yang ditetapkan. Tujuan pengukuran kinerja untuk memotivasi karyawan karyawan dalam sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. (Pandaleke et al., 2021)

#### **4. Pengembangan Indikator Kinerja**

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut (Mardiasmo, 2009) :

##### **a. Biaya Pelayanan (*cost of service*)**

Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit (*unit cost*), misalnya biaya per unit pelayanan (panjang jalan yang diperbaiki). Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya, karena output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan.

**Tabel 2.1**  
**Contoh Pengembangan Indikator Kinerja**

Dinas/Unit kerja	Indikator Kinerja
Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panjang jalan yang dibangun atau diperbaiki/total panjang jalan.</li> <li>• Panjang jalan yang disapu atau dibersihkan/total panjang jalan.</li> <li>• Kondisi jalan. Keamanan jalan (<i>road safety</i>).</li> </ul>

Sumber: Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, 2009)

b. Indikator Penggunaan (*utilization*)

Pada dasarnya membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan (*supply of service*) dengan permintaan publik (*public demand*). Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan pengukuran biasanya berupa *volume absolut* atau persentase tertentu, misalnya persentase penggunaan kapasitas.

c. Indikator Kualitas dan Standar Pelayanan

Merupakan indikator yang paling sulit diukur, karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subyektif. Penggunaan indikator kualitas dan standar pelayanan harus dilakukan secara hati-hati karena kalau terlalu menekankan indikator ini justru dapat menyebabkan kontra produktif. Contoh indikator kualitas dan standar pelayanan misalnya perubahan jumlah complain masyarakat atas pelayanan tertentu.

d. Indikator Cakupan Pelayanan

Indikator ini perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

e. Indikator Kepuasan

Diukur melalui metode pendapat secara langsung, bagi pemerintah daerah metode penjarangan aspirasi masyarakat (*need assessment*) dapat digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan.

## 5. Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Tujuan pengukuran kinerja sektor publik (Nur Khalifah Fitriah, 2021)

a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.

Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.

b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.

Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategi organisasi dan mewujudkan visi dan misinya. Sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi.

c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya.

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi.

d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward*, misalnya kenaikan gaji, tunjangan dan promosi atau *punishment* misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi dan teguran.

e. Memotivasi pegawai.

Adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*. *Reward* tersebut akan memotivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi.

f. Menciptakan akuntabilitas publik.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya menjadi dasar penilaian akuntabilitas.

## 6. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Manfaat dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik adalah sebagai berikut (Nur Khalifah Fitriah, 2021)

- a. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
- b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kinerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
- c. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- d. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
- e. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- f. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- g. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
- h. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
- i. Mengungkap permasalahan yang terjadi.

## 7. Sistem Pengukuran Kinerja

Kriteria sistem pengukuran kinerja adalah sebagai berikut (Ulfa, 2015):

### 1. Relevan (*relevance*)

Relevan mempunyai makna, yaitu :

- a. Terdapat kaitan yang erat antara standar untuk pekerjaan tertentu dengan tujuan organisasi
- b. Terdapat keterkaitan yang jelas antara elemen-elemen kritis suatu pekerjaan yang telah diidentifikasi melalui analisis jabatan dengan dimensi-dimensi yang akan dinilai dalam *form* penilaian.

### 2. Sensitivitas (*sensitivity*)

Sensitivitas berarti adanya kemampuan sistem penilaian kinerja dalam membedakan pegawai yang efektif dan pegawai yang tidak efektif.

### 3. Reliabilitas (*reliability*)

Reliabilitas dalam konteks ini berarti konsistensi penilaian. Dengan kata lain sekalipun instrument tersebut digunakan oleh dua orang yang berbeda dalam menilai seorang pegawai, hasil penilaiannya akan cenderung sama.

### 4. Akseptabilitas (*acceptability*)

Akseptabilitas berarti bahwa pengukuran kinerja yang dirancang dapat diterima oleh pihak-pihak yang menggunakannya.

### 5. Praktis (*practicality*)

Praktis berarti bahwa instrument penilaian yang disepakati mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses penilaian tersebut.

## **B. Anggaran Belanja**

### **1. Pengertian Anggaran**

Anggaran dapat difungsikan sebagai alat koordinasi antar bagian yang mendorong adanya komunikasi dan kesatuan tindakan. Anggaran juga didefinisikan sebagai suatu rencana tindakan (*plan of action*) yang dinyatakan secara kuantitatif mengenai apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi

atau perusahaan pada masa mendatang dalam hubungannya dengan pendapatan, arus kas, posisi keuangan dan rencana-rencana lainnya yang relevan dengan hal-hal tersebut. (Ratulangi, 2019)

Anggaran adalah suatu alat yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengarahkan, menjamin kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran perlu karena ada kebutuhan serta keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, tetapi sumber daya yang ada sangat terbatas. Anggaran perlu sebab ada masalah keterbatasan sumberdaya. (Ni Made Susanti Dewantari, 2021)

Anggaran (*budget*) adalah perencanaan yang dicatat untuk kegiatan yang terkait dengan organisasi yang ditunjukkan dalam mata uang, dan juga dapat ditunjukkan dalam unit barang atau jasa. (Sulistyawati et al., 2021)

## **2. Pengertian Belanja**

Belanja adalah pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (Zakia Arisandi, 2016)

## **3. Pengertian Anggaran Belanja**

Anggaran belanja atau *budget* umumnya merujuk pada daftar rencana seluruh biaya dan pendapatan. Anggaran belanja merupakan konsep penting dalam ekonomi mikro, yang menggunakan garis anggaran mengilustrasikan penjualan antara dua barang atau lebih. Dengan kata lain, anggaran belanja merupakan rencana organisasi yang dinyatakan dalam istilah moneter. (LellyAni et al., 2020)

## **4. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik**

Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu (Mardiasmo, 2009)

### **a. Anggaran Operasional**

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintahan yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “Belanja Rutin”. Belanja



rutin (*recurrent expenditure*) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah asset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut “Rutin” karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun.

b. Anggaran modal atau investasi (*capital/investment budget*)

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah *asset* atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

## 5. Fungsi-fungsi Anggaran

Anggaran memiliki banyak fungsi, dan fungsi-fungsi tersebut saling terkait sebagai berikut (Sulistyawati et al., 2021)

a. Fungsi perencanaan

Dapat menentukan pilihan tertentu untuk dilakukan di masa mendatang dengan menimbang sasaran perusahaan, adanya sumber daya ekonomi dan hambatan yang akan dijumpai di masa mendatang.

b. Fungsi koordinasi

Dikaitkan dengan perilaku berbagai bagian atau departemen di dalam perusahaan supaya bisa bekerja dengan harmonis untuk mencapai sasaran.

c. Fungsi komunikasi

Selama penyusunan anggaran, berbagai departemen dan tingkatan organisasi saling berhubungan dan berpartisipasi.

d. Fungsi motivasi

Anggaran juga dapat digunakan sebagai cara agar mendorong para pelaksana dalam menjalankan tugas atau mencapai sasaran.

- e. Fungsi pengendalian dan evaluasi  
 Karena anggaran yang sudah disepakati adalah tanggung jawab pelaksana yang ikut berpartisipasi atas penyusunan anggaran tersebut.
- f. Fungsi pendidik  
 Untuk membimbing para manajer terkait bagaimana melakukan pekerjaan secara terinci di pusat pertanggungjawaban yang dipimpin.

## **6. Tujuan Anggaran**

Tujuan anggaran sebagai berikut (LellyAni, et al., 2020) :

- a. Menyediakan perkiraan pendapatan dan ekspeditur, yakni membangun model bagaimana bisnis dapat berjalan secara finansial jika menjalankan strategi, pariwisata, dan rencana tertentu.
- b. Memungkinkan operasi keuangan bisnis yang sebenarnya untuk diukur terhadap perkiraan.

## **7. Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik**

Prinsip-prinsip anggaran sektor publik, meliputi (Mardiasmo, 2009) :

- a. Otorisasi oleh legislatif  
 Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
- b. Komprehensif  
 Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *non-budgetair* pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
- c. Keutuhan Anggaran  
 Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).
- d. *Nondiscretionary Appropriation*  
 Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.

e. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan

f. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.

g. Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.

h. Diketahui Publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

### **C. Value For Money**

#### **1. Pengertian Value For Money**

*Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* bersama-sama. (Mardiasmo, 2009)

Konsep *Value for Money* adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering kali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. *Value for Money* juga mengandung arti sebagai penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini berarti setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebagai mestinya. (Firmansyah, Muhtar Sapiri, 2018)

*Value for Money* merupakan prinsip pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for Money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya *input* paling kecil untuk mencapai *output* yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. (Shara et al., 2020)

*Value for money* merupakan konsep pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. (Maharani & Sari, 2021)

*Value for money* merupakan pengukuran kinerja keuangan pada organisasi pemerintah dan sektor publik. “kinerja pemerintah tidak dapat dinilai hanya dari sisi *output* yang dihasilkan, akan tetapi secara integritas harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama sehingga benar-benar menggambarkan kinerja pemerintah yang baik dan benar. (Mentari Oktaviani Sarumaha, Samalua Waoma, 2021)

## **2. Pengukuran *Value For Money***

Ketiga pokok dalam bahasan *value for money* sangat berkaitan satu dengan lainnya. Ekonomis mengenai masukan, efisiensi membahas mengenai masukan dan keluaran, dan efektivitas membahas mengenai keluaran dan dampak. (Mardiasmo, 2009)

## **3. Konsep *Value For Money***

*Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor public yang mendasarkan pada tiga elem utama, yaitu: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Adapun definisi *input*, *output*, dan *outcome* sebagai berikut (Mardiasmo, 2009)

### a. *Input*

Merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas.

### b. *Output*

Merupakan hasil atau nilai tambah yang dicapai oleh kebijakan, program, dan aktivitas.

### c. Sasaran antara (*Throuhput*)

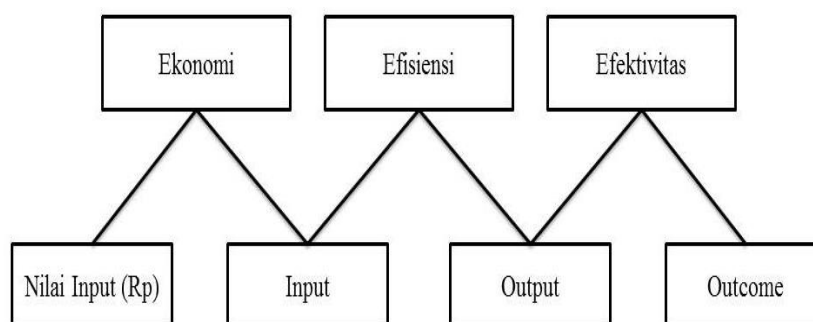
Merupakan analisis *value for money* memerlukan data *input* dan data *output* yang memadai karena *value for money* mempunyai kaitan erat dengan pengukuran *input* dan *output*.

d. *Outcome*

Merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Penetapan dan pengukuran terhadap *outcome* sering kali lebih sulit dibandingkan penetapan dan pengukuran terhadap *input* maupun *output*.

Implementasi konsep 3E diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik.

**Gambar 2.1**  
**Konsep *Value For Money***



Sumber: Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, 2009)

#### 4. Indikator *Value For Money*

*Value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektifitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. (C. J. Putri, 2020)

a. Ekonomi

Ekonomi berarti sumber daya yang inputnya harus diperoleh dengan harga rendah yang mendekati harga pasar. *Input* adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan *output*.

b. Efisiensi

Suatu organisasi, program, atau kegiatan dapat dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya.

c. Efektifitas

Efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Efektifitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

### 5. Manfaat *Value For Money*

Manfaat yang diinginkan dalam pelaksanaan *value for money* pada organisasi sektor publik yaitu, (Mardiasmo, 2009) :

- a. Ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya.
- b. Efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaan diminimalkan dan hasilnya di maksimalkan.
- c. Efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

### 6. Langkah-langkah Pengukuran *Value For Money*

Adapun metode yang digunakan dalam kinerja salah satunya dengan menggunakan konsep 3E

a. Ekonomis

Ekonomis (hemat) sering disebut dengan kehematan yang mencakup juga secara berhati-hati dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tak perlu. Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomi.

Tingkat ekonomis, dinyatakan dengan rumus berikut (Muchamad Rizki, 2014):

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Kriteria ekonomis adalah:

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti ekonomis.
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x=100\%$ ) berarti ekonomis berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x>100\%$ ) berarti tidak ekonomis.

b. Efisiensi

Efisiensi berhubungan erat dengan produktivitas, pengukuran efisiensi (berdaya guna) dilakukan menggunakan Perbandingan antara *output* yang dihasilkan dengan digunakan (*cash of output*). Proses kegiatan operasional ini dapat dikatakan efisiensi apabila produk yang dihasilkan atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*), jadi pada dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomis karena keduanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*) Pengukuran tingkat *input* dari organisasi sektor publik terhadap tingkat *output* nya memerlukan data-data realisasi biaya untuk mengukur tingkat efisiensi.

Tingkat efisiensi, dinyatakan dengan rumus berikut (Zakia Arisandi, 2016) :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria efisiensi berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. adalah :

- 1) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% maka anggaran belanja berarti dikatakan tidak efisiensi.
- 2) Jika diperoleh nilai antara 90%-100% maka anggaran belanja berarti dikatakan kurang efisiensi.
- 3) Jika diperoleh nilai antara 80%-90% maka anggaran belanja berarti dikatakan cukup efisiensi.
- 4) Jika diperoleh nilai antara 60%-80% maka anggaran belanja berarti dikatakan efisiensi

- 5) Jika diperoleh nilai dibawah 60% maka anggaran belanja berarti dikatakan sangat efisiensi.

c. Efektivitas

Efektivitas berhubungan dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Tingkat efektivitas, dinyatakan dengan rumus berikut (Muchamad Rizki, 2014)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Biaya Operasional}}{\text{Anggaran Biaya Operasional}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas berdasarkan pada Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. adalah :

- 1) Jika diperoleh nilai 100% keatas berarti sangat efektif.
- 2) Jika diperoleh nilai 90% sampai 100% berarti efektif.
- 3) Jika diperoleh nilai 80% sampai 90% berarti cukup efektif.
- 4) Jika diperoleh nilai 60% sampai 80% berarti kurang efektif.
- 5) Jika diperoleh nilai kurang dari 60% berarti tidak efektif.

**D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Ayu Rama Ningsih, 2020) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan *Value For Money* pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini jenis penelitian deskriptif, data yang digunakan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan mengukur kinerja pemerintah menggunakan suatu pendekatan *value for money* pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan hasil menunjukkan tahun 2016-2017 mengalami fluktuasi dan dikategorikan kurang ekonomis dengan rasio di antara 80%-90% , dan masih tidak efisien karena rasio efisiensi rata-rata diatas 100% dan efektivitas dikategorikan



efektif. Persamaan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti dengan menggunakan metode *value for money*. Perbedaan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah objek penelitiannya. Penelitian dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina marga sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian penelitian sebelumnya menganalisis kinerja keuangan sedangkan penelitian sekarang melakukan pengukuran kinerja anggaran belanja.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Sri Kurnia, 2016) dengan judul Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder kemudian analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang jika dilihat dari tingkat ekonomis tahun anggaran 2012-2015 mengalami fluktuasi dan dikategorikan ekonomis. Ditinjau dari tingkat efisien tahun anggaran dikategorikan kurang efisien dan tidak efisien karena rasio efisiensi di antara 90%-100%. Persamaan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti dengan menggunakan metode *value for money*. Perbedaan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah objek penelitiannya. Penelitian terdahulu dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian penelitian sebelumnya menganalisis kinerja keuangan sedangkan penelitian sekarang melakukan pengukuran kinerja anggaran belanja.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Dian Pratiwi, 2020) dengan judul Pengukuran Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau Tahun 2019). Jenis penelitian ini adalah studi kasus, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dalam

penelitian ini, pengukuran tingkat ekonomis membandingkan antara realisasi dana yang digunakan dengan dana yang dianggarkan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja Program Pembangunan Jalan dan Jembatan tahun 2019 masuk dalam kategori ekonomis, efisien, dan efektif, dari hasil total keseluruhan ada beberapa kegiatan yang tidak efektif sehingga untuk tingkat efektivitas menjadi tidak efektif. Persamaan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti pengukuran kinerja anggaran belanja dengan menggunakan metode *value for money* Perbedaan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah objek penelitiannya. Penelitian terdahulu dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau. sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Selatan.